

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- — — — —, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- — — — —, 2011, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ash-shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R., Ridwan, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusnadi, Ady dkk, 2010, *Masalah Hukum Jabatan Notaris Dalam Kegiatan Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. dan Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Massier, A.B. dkk, 2000, *Personen en Familierecht (Hukum Orang dan Keluarga)*, KITLV Uitgeverij, Leiden.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- — — — —, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Penerbit Karya Media, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1994, *Fungsi PPAT Menurut PP 10 Tahun 1961*, Airlangga Press, Surabaya.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Parlindungan, A.P., 1983, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung.
- Prinst, Darwan, 1993, *Strategi Memenangkan Perkara Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwadaminta, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan kelima, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

- Soeroso, R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Tobing, GHS Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Utrecht, E., 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.
- Yuliani, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Makalah/Jurnal/Majalah/Disertasi**

- Adjie, Habib, “Telaah Ulang : Kewenangan PPAT Untuk Membuat Akta, Bukan Mengisi Blanko/Formulir Akta”, *Majalah Renvoi*, Jakarta, Tahun 2007.
- \_\_\_\_\_, “Akta PPAT Bukan Akta Otentik”, *Majalah Renvoi*, Jakarta, Tahun 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, “Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Majalah Media Notariat* Edisi April-Juni Tahun 2003.
- Latumeten, Pieter, “Teknik Pembuatan Akta PPAT Tanpa Blanko Akta Versi PERKABAN Nomor 8 Tahun 2012”, *Makalah*, Bandung, tanggal 20 Maret 2013.
- M. Hadjon, Philipus, “Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Serta Figur Hukum Akta PPAT”, *Makalah*, Surabaya, tanggal 22 Februari 1996.
- Hamid, A. S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Patittingi, Farida, “Keberadaan Jabatan PPAT Bersumber Pada UUPA”, *Makalah*, Jakarta, tanggal 14 Juli 2012.
- Soerodjo, Irawan, “Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yunarko, Bambang, “Kedudukan Jabatan dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Perspektif* Edisi September Tahun 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Jabatan Notaris (stb. Tahun 1860 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Denga Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2344).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

#### **D. Internet**

Maliki Ibrahimafi, “Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan”, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 2 April 2016.

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum : Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat”, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 2 April 2016.